

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan stabilitas inflasi menjadi ukuran keberhasilan kebijakan perekonomian. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, negara akan mengambil langkah untuk mengoptimalkan instrumen bagi pertumbuhan ekonominya. Salah satu instrumen ini, dapat diukur dari tingkat perdagangan negara tersebut.

Proses globalisasi telah membuka peluang bagi para aktor negara untuk meningkatkan perdagangannya melalui perdagangan internasional. Dalam konteks perekonomian terbuka, perdagangan internasional merujuk kepada aktivitas ekspor dan impor antarnegara yang merupakan, sebuah bentuk pertukaran barang dan jasa antarindividu atau perusahaan dari negara yang berbeda.¹ Oleh sebab itu, perdagangan internasional secara langsung diperlukan untuk memberikan keuntungan maupun alokasi efisiensi sumber daya yang diinginkan. Karenanya, segala bentuk hambatan pada perdagangan menjadi sebuah distorsi yang harus dihindari.²

Hambatan perdagangan dapat terlihat dari penetapan sanksi ekonomi.³ Sanksi ekonomi pada dasarnya digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menyortir perilaku negara lain. Pemberlakuan sanksi tersebut diharapkan dapat

¹ Vesna Grozdanovskaa, Nikolche Jankulovski dan Katerina Bojkovska, "International Business and Trade," *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)* 31, no. 3 (2017): 112.

² Aam Slamet Rusydiana, "Hubungan Antara Perdagangan Internasional Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia," *Islamic Finance & Business Review* 4, no. 1 (Januari- Juli 2009): 47.

³ Charles A. Rarick, "Economic Sanctions: Astuti Policy or Just another Barrier to Free Trade?" *American Journal of Trade and Policy* 3, no. 2 (2016): 71.

mengganggu kondisi perekonomian negara tujuan melalui pembatasan terhadap arus bebas barang dan jasa, yang mana dapat menciptakan defisit atau penurunan terhadap perdagangan suatu negara.

Diperlukan sebuah tindakan untuk menekan dampak negatif dari pemberlakuan sanksi ekonomi. Adapun sejak perdagangan internasional menjadi sebuah aktivitas yang tidak dapat terlepas dari interaksi para aktor internasional, diplomasi menjadi salah satu komponen yang digunakan dalam mengatasi hambatan perdagangan.⁴ Hal ini dikarenakan, diplomasi merupakan sarana politik luar negeri dalam membentuk interaksi antarnegara guna mencapai kepentingan nasional.⁵

Sebagai negara dengan ekonomi berbasis pasar, Rusia dalam hal ini selalu berusaha untuk menjaga performa kondisi perekonomiannya lewat interaksi dagang. Namun, sejak Rusia menjadi aktor utama dalam menciptakan krisis di Ukraina, Rusia mengalami sebuah hambatan perdagangan yang mengancam kondisi perdagangannya lewat pemberlakuan dua fase sanksi ekonomi oleh Uni Eropa. Fase pertama pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa disebabkan oleh tindakan aneksasi Rusia pada Februari 2014 di salah satu wilayah Ukraina yakni, Krimea.⁶ Sanksi ekonomi fase pertama tersebut diberlakukan pada Juli 2014 hingga 23 Juni 2023 yang menargetkan sektor-sektor utama Rusia termasuk senjata, energi (minyak), dan keuangan.⁷ Pemberlakuan sanksi ekonomi fase kedua oleh Uni Eropa

⁴ G.A Pigman, "International Trade as Diplomacy," in *Trade Diplomacy Transformed*, diedit oleh Timothy M. Shaw (London: Palgrave Macmillan, 2016), 1-2.

⁵"Diplomacy as a good governance," Diplomacy.edu, diakses 8 Februari, 2023, <https://www.diplomacy.edu/topics/economic-diplomacy/>.

⁶ Ali Muhammad dan Muhammad F. Athifi, "Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok," *Insignia Journal of International Relations* 8, no. 2 (November 2021): 136.

⁷ "Crimea and the city of Sevastopol: EU extends sanctions over Russia/s ilegal annexation by one year," Council of the EU, diakses 8 Februari, 2023,

disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Fase kedua sanksi ekonomi tersebut diberlakukan sejak 25 Februari 2022 hingga 31 Juli 2023, dengan penetapan perluasan target sanksi pada sektor keuangan, energi (batu bara dan minyak), senjata, media, serta transportasi.⁸ Adapun tak hanya memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia, Uni Eropa juga memperingati para pihak ketiga untuk tidak menurunkan efektivitas sanksi terhadap Rusia.⁹

Rusia memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Uni Eropa. Sebagai mitra dagang, Uni Eropa merupakan mitra terbesar bagi Rusia dimulai sejak runtuhnya Uni Soviet.¹⁰ Prasanksi ekonomi diberlakukan, ketergantungan Rusia kepada Uni Eropa sebagai mitra dagang mencapai persentase sebesar 41%.¹¹ Dengan besarnya pengaruh Uni Eropa terhadap arus perdagangan Rusia, sanksi ekonomi yang telah diberlakukan oleh Uni Eropa mampu menciptakan penurunan sebesar 33.6% terhadap perdagangan Rusia pada tahun 2015 dan 2016.¹² Pada tahun yang sama, kondisi perdagangan yang terjadi kepada Rusia ini kemudian ikut menurunkan pertumbuhan ekonomi Rusia sebesar 31%, dikarenakan komponen pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan ekspor bersih Rusia mengalami penurunan.¹³

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/20/crimea-and-the-city-of-sevastopol-eu-extends-sanctions-over-russia-s-illegal-annexation-by-one-year/>.

⁸ Cory Welt, *Prepared for Members and Committees of Congress, Russia's 2022 Invasion of Ukraine: Overview of U.S. Sanctions and Other Responses*, CRS Report IN11869 (Washington, DC: Congressional Research Service, 21 Oktober 2022).

⁹ "EU to impose new sanctions on Belarus, Iran for Help ini Russia in war on Ukraine: Spokesman," AA, diakses 1 April, 2023, <https://www.aa.com.tr/en/politics/eu-to-impose-new-sanctions-on-belarus-iran-for-helping-russia-in-war-on-ukraine-spokesman/2786297>.

¹⁰ C.P.F. Luhulima, "Perkembangan Hubungan Uni Eropa-Rusia" *Jurnal Kajian Wilayah Eropa* 3, no.2 (2007): 72-73.

¹¹ "Russia trade ties with Europe," BBC News, diakses 8 Februari, 2023, <https://www.bbc.com/news/world-europe-26436291>.

¹² "Russia Trade Balance 1989-2023," macrotrends, diakses 8 Februari, 2023, <https://www.macrotrends.net/countries/RUS/russia/trade-balance-deficit>.

¹³ "GDP, PPP (current international \$) - Russian Federation," World Bank, diakses 16 Juli, 2023, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=RU>.

Hambatan dagang berupa sanksi ekonomi Uni Eropa yang mengancam perekonomian Rusia pada dasarnya juga dapat mengancam perekonomian dunia. Hal ini dikarenakan, Rusia yang termasuk negara penyumbang energi terbesar di dunia akan mengalami penurunan pada kegiatan produksi dan ekspor energinya. Hambatan tersebut kemudian akan menyebabkan ketidakstabilan harga energi serta pengaruh lain terhadap akumulasi masalah-masalah ekonomi dunia yang saling berkaitan.¹⁴

Dalam mengatasi dampak negatif pemberlakuan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa dan melindungi kepentingan ekonomi Rusia di pasar internasional, pada November 2016 Rusia memberlakukan kebijakan peralihan pasar dari Barat ke Asia dengan negara prioritas Tiongkok.¹⁵ Penerapan *great power diplomacy* digunakan Rusia sebagai upaya ambisius Presiden Vladimir Vladimirovich Putin untuk menarik kekuatan besar lainnya yaitu Tiongkok melalui kapabilitas militer, ekonomi, dan pengaruh politik yang kuat.¹⁶ Adapun kapabilitas Rusia ini dapat mendefinisikan Rusia sebagai kekuatan besar yang aktif di samping kekuatan besar lainnya dalam sistem multipolar.¹⁷ Dengan penerapan strategi *great power diplomacy*, Rusia berharap dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok dan meyakinkannya untuk menjalin kerja sama yang kuat dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan mencapai kepentingan Rusia terutama mengatasi krisis akibat sanksi ekonomi Uni Eropa.

¹⁴ Agfajrina Cindra Pamungkas, Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, dan Anggi Putri, "Implikasi Sanksi Ekonomi Bagi Rusia Terhadap Potensi Eskalasi Harga Minyak dan Gas Alam Pada Distribusi Pasar Dunia," *Journal of International Relations* 1, no.1 (Februari 2022): 53.

¹⁵ Anna Maria Dyner, "The Russian Federation's New Foreign Policy Concept," *PISM Bulletin*, no. 1 (3 Januari 2017): 2.

¹⁶ Fenghua Liu, "Russia's Foreign Policy Over the Past Three Decades: Change and Continuity," *Chin. J. Slavic Stu* 2, no. 1(2022): 98.

¹⁷ Mark N. Katz, "Great Powers in the Twenty-First Century," *Journal of International Relations and Sustainable Development*, no. 10 (2018): 122.

Sejak sanksi ekonomi diberlakukan terhadap Rusia, Uni Eropa kerap memberikan peringatan kepada negara-negara pihak ketiga termasuk Tiongkok untuk tidak membantu perekonomian Rusia, baik dari meningkatkan bantuan luar negeri maupun meningkatkan perdagangannya dengan Rusia. Uni Eropa menekan Tiongkok dengan melakukan tindakan mempersif yang menciptakan rasa ketergantungan Tiongkok terhadap Uni Eropa hingga peringatan pemberlakuan sanksi terhadap Tiongkok.¹⁸ Atas dasar rasa ketergantungan dan peringatan tersebut, Tiongkok kemudian berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang mampu mengurangi dampak sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia, namun pernyataan Tiongkok ini berlawanan dengan tindakannya.¹⁹ Perdagangan Rusia dengan Tiongkok justru semakin meningkat setelah *great power diplomacy* dalam mengatasi dampak sanksi ekonomi diterapkan. Dibandingkan tahun 2016, peningkatan ini mencapai 78.4% pada tahun 2017 hingga tahun 2022, didominasi oleh ekspor komoditas energi Rusia ke Tiongkok.²⁰

Pascasanksi ekonomi Uni Eropa diberlakukan, sebesar 57% pendapatan ekspor Rusia didapatkan dari pasar Tiongkok.²¹ Pendapatan ekspor tersebut telah membantu dalam menambah arus kas Rusia setelah Uni Eropa memotong pembelian dan mengeluarkan Rusia dari sistem perbankan global. Posisi kemitraan Uni Eropa pun dalam hal ini dapat tergantikan dengan Tiongkok. Oleh karena itu,

¹⁸ "EU Warns China Not to Help Putin Bust Sanctions," Politicopro, diakses 22 Maret, 2023, <https://www.politico.eu/article/eu-china-xi-jinping-russia-president-vladimir-putin-sanctions-ukraine-war/>.

¹⁹ "China Keeps West Guessing About Economic Pressure on Russia," The Diplomat, diakses 10 Februari, 2023, <https://thediplomat.com/2022/09/china-keeps-west-guessing-about-economic-pressure-on-russia/>.

²⁰ "Russia's 2022 Trade With China," Russia Briefing, diakses 11 Januari, 2023, <https://www.russia-briefing.com/news/russia-s-2022-trade-with-china-geographic-breakdown.html/>.

²¹ "Russia," *The Observatory of Economic Complexity*, diakses 8 Februari, 2023, <https://oec.world/en/profile/country/rus>.

tercipta peningkatan berkelanjutan terhadap neraca perdagangan Rusia sebesar 151% pada tahun 2017 hingga tahun 2022.²²

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penerapan kebijakan *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh adanya bukti data keberhasilan *great power diplomacy* Rusia dalam meningkatkan perdagangannya terlepas dari prinsip Tiongkok untuk tidak melakukan pelanggaran sanksi ekonomi, atas dasar tekanan Barat. Oleh karena itu, *great power diplomacy* Rusia dalam menarik Tiongkok untuk menyokong perdagangan menjadi sebuah keunikan yang patut untuk dikaji. Penelitian ini akan berfokus terhadap analisis strategi *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangan pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa.

1.2 Rumusan Masalah

Pascapemberlakuan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa atas krisis di Ukraina, Rusia mengalami hambatan dagang yang mengancam kondisi perekonomiannya. Sejak saat itu, Rusia memberlakukan kebijakan peralihan pasar dengan menggunakan penerapan *great power diplomacy* terhadap Tiongkok untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. Melalui penerapan *great power diplomacy*, Tiongkok bersedia membantu memperbaiki krisis perdagangan Rusia melalui peningkatan kerja sama dagang, terlepas dari prinsip Tiongkok atas dasar tekanan Barat untuk tidak melakukan pelanggaran sanksi ekonomi dan tidak memihak Rusia. *great power diplomacy* kemudian berhasil membawa hubungan dagang antara Rusia dan Tiongkok mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, strategi *great power diplomacy* Rusia terhadap

²² “Key Aggregates of the Balance of Payments of the Russian Federation,” Bank of Russia, diakses pada 8 Februari, 2023, http://www.cbr.ru/eng/statistics/macro_itm/svs/bop-eval/.

Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah di atas maka terdapat pertanyaan penelitian yaitu, bagaimana strategi *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk menganalisis upaya *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam disiplin ilmu hubungan internasional, terutama dalam bidang ekonomi politik global yang mengaplikasikan *great power diplomacy* dalam mencapai kepentingan ekonomi suatu negara. Kegunaan akademik lainnya dari penelitian ini ialah, dapat menjelaskan bahwa penggunaan diplomasi pada suatu negara harus dikategorikan sesuai dengan kepentingan serta status dari suatu negara tersebut dalam sistem internasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu institusi tertentu yang bergerak dalam menjalankan tahapan maupun aktivitas diplomasi seperti

Kementerian Luar negeri dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam mencapai kepentingan nasional yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Kegunaan praktis lainnya dari penelitian ini ialah, untuk membantu pemerintah dalam memahami keadaan ekonomi politik Rusia dan penerapan diplomasinya, sehingga pemerintah dapat menentukan perilaku dalam menjalankan hubungan kerja sama dengan Rusia.

1.6 Studi Pustaka

Dalam rangka mencapai analisis pada penelitian, peneliti menggunakan beberapa literatur ilmiah yang dijadikan sebagai sumber referensi untuk mendukung peneliti dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, di antaranya:

Tulisan pertama yang mampu mendukung proses penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Charles A. Rarick dengan judul *Economic Sanctions: Astute Policy or Just another Barrier to Free Trade?*.²³ Artikel ini mengkaji perihal sanksi ekonomi yang digunakan sebuah aktor negara atau lebih sebagai alat kebijakan luar negeri untuk mengubah perilaku aktor negara lainnya. Sanksi ekonomi dimaksudkan untuk menjadi hambatan bagi perdagangan bebas yang diterapkan suatu negara yang dikenakan sanksi. Dalam tulisan ini dikaji keadaan ekonomi tiga negara yang dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat.

Negara pertama yang dikaji adalah Kuba, pada tahun 1962 Presiden Kennedy menetapkan embargo penuh terhadap hampir semua perdagangan dan investasi di Kuba. Berangkat dari hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Kuba terhambat oleh kebijakan ekonomi internalnya dan sanksi ekonomi yang

²³ Charles A. Rarick, "Economic Sanctions: Astute Policy or Just another Barrier to Free Trade?," *American Journal of Trade and Policy*, Vol 3, No. 2 (2016):71-76.

diberlakukan oleh Amerika Serikat. Myanmar adalah contoh lain dari dampak yang diberikan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang yang pada dasarnya melarang bisnis di Myanmar untuk perusahaan Amerika Serikat. Oleh karena itu, terjadi pengangguran tinggi di Myanmar akibat perusahaan-perusahaan yang tutup dan penurunan terhadap PDP per kapitanya.

Di lain sisi, Iran juga ikut terjun menjadi partisipan negara yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat atas proliferasi nuklir. Iran menerapkan strategi dalam mengatasi dampak negatif sanksi ekonomi Amerika Serikat seperti penggunaan perantara keuangan maupun peralihan pasar. Namun, tak dapat dipungkiri bahwasanya Iran tidak mampu mengaplikasikan strategi hingga berhasil mengatasi hambatan dagang tersebut. Hal ini terlihat dari defisit perdagangan yang dialami oleh Iran.

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi peneliti untuk melihat bagaimana sanksi ekonomi dapat menjadi sebuah hambatan bagi perdagangan bebas suatu negara yang dijatuhkan sanksi. Melalui analisis kasus dari beberapa negara yang terkena sanksi oleh Amerika Serikat, peneliti dapat menilai bahwa sanksi ekonomi mampu mengubah perilaku suatu negara sebab terjadinya penekanan terhadap kondisi perekonomiannya. Sanksi ekonomi telah berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian Kuba, Myanmar, dan Iran. Pada akhirnya, peneliti dapat membandingkan kegagalan Kuba, Myanmar, dan Iran yang terbukti tidak mampu menyamakan kemampuan Rusia dalam mengatasi hambatan dagang serupa.

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti Adapun perbedaan penelitian dengan referensi tulisan ini terdapat pada

objek penelitian, yang mana referensi menetapkan Kuba, Myanmar, dan Iran sebagai objek. Sedangkan penelitian akan menggunakan Rusia sebagai objek dalam penelitian. Selain itu, perbedaan juga berada pada tema pembahasan, di mana referensi hanya membahas bagaimana dampak dari sanksi, sedangkan penelitian akan membahas mengenai solusi maupun strategi dalam mengatasi sanksi tersebut.

Tulisan kedua merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Thieß Petersen dan Thomas Schwab dengan judul *Trade Sanctions-Effects and Side Effects*.²⁴ Artikel ini mengkaji perihal dua sanksi dalam bidang perdagangan internasional yaitu, pemboikotan barang dan jasa ke negara yang dikenakan sanksi serta larangan ekspor barang dan jasa dari negara yang dikenai sanksi. Efek dari larangan ekspor bagi negara akan berimplikasi terhadap pengurangan pendapatan perusahaan yang berujung kepada kurangnya lapangan pekerjaan, hilangnya daya beli yang diawali oleh pembatasan pengeluaran suatu rumah tangga, dan gangguan produksi. Dampak larangan impor juga memiliki pengaruh besar terhadap negara yang dikenakan sanksi sebab, negara yang terdampak sanksi terpaksa melepaskan pendapatan ekspor karena permintaan produk dari perusahaan pengeksportur turun. Selain itu, produksi domestik akan terhambat karena kurangnya suku cadang dan bahan mentah yang biasa didapatkan dari negara pengeksportur.

Studi empiris yang disinggung oleh tulisan ini menyatakan bahwasanya dari evaluasi terhadap 68 negara yang terkena sanksi pada periode 1976 hingga 2012, menunjukkan resesi akibat penurunan produk domestik. Rusia adalah salah satu negara yang sempat mengalami resesi dari tahun 2015 hingga 2016 akibat sanksi

²⁴ Thieß Petersen, dan Thomas Schwab, "Trade Sanctions-Effects and Side Effects," *Wirtschaftsdienst*, Vol. 102, No. 5(2022): 354-360.

dalam konteks aneksasinya ke Ukraina. Dalam tulisan ini juga ikut dikaji mengenai pentingnya negara ketiga sebagai salah satu solusi alternatif untuk negara yang dikenakan sanksi. Jika negara ketiga memiliki penawaran dan permintaan yang tinggi, maka negara yang terkena sanksi dapat mengalihkan pasarnya kepada negara ketiga tersebut.

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi peneliti untuk melihat besarnya dampak sanksi perdagangan terhadap kondisi perekonomian suatu negara yang terkena sanksi. Dengan adanya penjelasan pada dampak ini maka, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi perdagangan memiliki efek berpengaruh. Sanksi perdagangan yang dikenakan bukan hanya sebagai instrumen tak berarti bagi perekonomian suatu negara yang terkena sanksi, dan bukan tidak mungkin hal ini juga memiliki dampak yang sama dengan Rusia. Namun, pada kenyataannya Rusia mampu menekan dampak sanksi ekonomi Uni Eropa.

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian terdapat dalam pembahas yang akan digarap, di mana tulisan hanya membahas mengenai dampak sanksi ekonomi terhadap kondisi perdagangan yang memiliki relasi dengan kondisi perekonomian suatu negara. Adapun pada penelitian terdapat keunikan, di mana kondisi perdagangan Rusia mampu bertahan dari sanksi ekonomi yang telah diberlakukan oleh Uni Eropa. Untuk itu, tulisan ini akan dijadikan referensi untuk membuktikan keunikan penelitian.

Tulisan ketiga merujuk pada artikel yang ditulis oleh Eva Vilà Sánchez dengan judul *The European Union's sanctions regime on the Russian Federation*

*from 2014 to 2022.*²⁵ Artikel ini berusaha untuk menjelaskan evaluasi perkembangan sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa dari tahun 2014 hingga 2022. Pada 29 Juli 2014 Uni Eropa memulai penerapan sanksi kepada Rusia yang menargetkan berbagai entitas serta individu yang mencakup pembatasan keuangan, embargo energi, dan teknologi militer. Sanksi ini diberlakukan atas perilaku Rusia yang mencoba untuk melakukan serangan militer ke wilayah Ukraina yakni, Krimea.

Didorong oleh konflik Krimea yang belum usai, keinginan Ukraina untuk bergabung dalam aliansi NATO semakin tinggi, terlebih dibawah kepemimpinan Presiden Voldymyr Zelenskyy yang arah kebijakannya mengarah ke pro-Barat. Pada 24 Februari 2022, Rusia kembali menginstruksikan serangan militer ke beberapa kota besar Ukraina. Hal ini kemudian mendorong Uni Eropa untuk memperluas sanksi terhadap Rusia, dengan memberikan sembilan paket sanksi yang menargetkan sektor Rusia mulai dari keuangan, energi, media, senjata, transportasi hingga tindakan visa.

Selanjutnya artikel berusaha untuk menganalisis dampak langsung yang dirasakan Rusia atas tindakan pembatasan Uni Eropa. Dapat terlihat bahwasanya sanksi mampu memberikan dampak terhadap perekonomian maupun perdagangan Rusia pada tahun 2014 dan 2015. Namun, Rusia mampu beradaptasi dari sanksi, khususnya pada saat sanksi fase kedua tahun 2022 diberlakukan. Adaptasi tersebut merupakan strategi-strategi Rusia yang diterapkan untuk mengatasi dampak sanksi dengan menjaga stabilitas lapangan kerja dan pendapatan.

²⁵ Eva Vilà Sánchez, "The European Union's sanctions regime on the Russian Federation from 2014 to 2022" *Quaderns IEE: Revista de l'Institut d'Estudis Europeus*, Vol. 2, No. 1 (31 Januari 2023): 25-60.

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi peneliti untuk melihat sanksi apa saja yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap Rusia dari tahun 2014 hingga 2022. Adapun tulisan ini bermanfaat bagi penelitian untuk melihat faktor apa yang mendorong Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina yang menyebabkan Rusia dikenakan sanksi ekonomi atas tindakannya. Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa campur tangan negara lain terhadap situasi Rusia dan Ukraina tak terlepas dari hubungan yang dimiliki negara pemberi sanksi dengan Ukraina. Selanjutnya, analisis tulisan mengenai hasil pencapaian sanksi serta adaptasi Rusia terhadap sanksi mampu menjadi acuan peneliti untuk membuktikan bahwasanya sanksi mampu diatasi oleh pemerintah Rusia.

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti. Secara garis besar tulisan ini membahas dampak sanksi Uni Eropa terhadap Rusia dengan menyinggung keberhasilan adaptasi sanksi Rusia. Sedangkan penelitian ini akan berfokus terhadap strategi yang digunakan Rusia dalam mengatasi dampak sanksi ekonomi internasional atas invasi Rusia ke Ukraina melalui diplomasi ekonominya terhadap Tiongkok.

Tulisan keempat merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Ary Rian Anggara dengan judul *Strategi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa (2014-2015)*.²⁶ Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Neo-realisme dan Geopolitik untuk menganalisis strategi Rusia untuk bertahan dari sanksi ekonomi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat di sistem internasional yang anarkis. Terdapat strategi utama Rusia untuk bertahan dari

²⁶ Ary Rian Anggara, "Strategi Rusia Menghadapi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa (2014-2015)," *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 3 (2018): 995-1010.

dampak sanksi ekonomi Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah pertama adalah dengan menerapkan strategi melalui translokasi pangsa pasar ke Asia Timur yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, layaknya Tiongkok. Kedua, Rusia menetapkan kebijakan pada pembangunan sektor agrikultur dan substitusi impor, dengan menggunakan alokasi pendanaan nasional. Walaupun sempat mengalami penurunan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 hingga 2015, strategi pemerintah Rusia sebagai bentuk respon dari sanksi ekonomi yang ditangguhkan, dinilai berhasil ter aplikasikan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya Produk Domestik Bruto Rusia dari tahun 2016 hingga tahun 2017.

Tulisan ini layak dijadikan sebagai referensi peneliti untuk melihat bagaimana Rusia mampu bangkit dari sanksi ekonomi yang dikenakan padanya. Strategi apa yang diterapkan Rusia sehingga hambatan dagang dapat diperbaiki dan bahkan tidak dapat mengubah perilaku Rusia atas kebijakan luar negerinya terhadap Ukraina, seperti yang diinginkan oleh negara-negara pemberi sanksi. Tulisan kemudian memberikan strategi yang digunakan Rusia lewat peralihan pasar ke Asia yang mampu membantu arus dagang industri migas Rusia, dibuktikan dengan peningkatan eksplorasi migas dan produksi migas di Rusia pada tahun 2017. Selain itu, Rusia juga mampu meningkatkan produksi agrikultur yang mampu mengatasi ketergantungan impor Rusia pada Uni Eropa.

Adapun tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti. Tulisan memiliki kurun waktu analisis dampak sanksi yang diberikan sejak tahun 2015-2017 sedangkan, strategi Rusia yang diteliti peneliti dari tahun 2016 hingga tahun 2022. Terdapat juga perbedaan dari kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti. Peneliti dalam hal ini menggunakan kerangka konsep *great*

power diplomacy yang dikemukakan oleh Cornelia Navari untuk menganalisis strategi yang digunakan Rusia dalam meningkatkan perdagangan terlepas dari pemberlakuan sanksi ekonomi. Sedangkan, pada tulisan digunakan kerangka konsep merkantilisme tanpa menekankan penggunaan diplomasi ekonomi. Tulisan juga hanya memberikan fokus peralihan pasar ke sebagian wilayah, yang mana artinya belum menggambarkan tujuan pasar Rusia secara bilateral, regional, dan multilateral.

Tulisan kelima merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Fenghua Liu dengan judul *Russia's Foreign Policy Over the Past Three Decades: Change and Continuity*.²⁷ Selama tiga dekade terakhir kebijakan luar negeri Rusia mengalami perkembangan melalui enam tahap. Tahap pertama *Pro-Western Diplomacy* (1991-1995), kebijakan ini mengarah kepada pengembangan hubungan dengan Barat. Tahap kedua *Multipolar Diplomacy* (1996-2000), Rusia berkomitmen untuk mengembalikan status Rusia sebagai kekuatan besar dan mempromosikan dunia multipolar. Tahap ketiga *Pragmatism Diplomacy* (2001-2004), Rusia berkomitmen untuk membentuk lingkungan eksternal yang dapat memberikan keuntungan pemasangan ekonomi dan sosial. Tahap keempat *Neo-Slavism* (2005-2008), Rusia berkomitmen untuk melawan dominasi Amerika Serikat dan campur tangan Eropa di wilayah CIS namun tetap mengejar kerja sama strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tahap kelima *Stability and Cooperation Diplomacy* (2009-2013), Rusia berkomitmen untuk mempertahankan status kekuatan besar, hubungan stabil dengan Barat, stabilitas kawasan CIS, dan stabilitas politik dalam negeri. Terakhir

²⁷ Fenghua Liu, "Russia's Foreign Policy Over the Past Three Decades: Change and Continuity," *Chin. J. Slavic Stu*, Vol. 2, No. 1(2022): 86-99.

Great Power Diplomacy (2014–sekarang), merespons krisis Ukraina dan sanksi ekonomi Barat, Rusia berkomitmen untuk menekan pengaruh Barat di Rusia dengan melakukan peralihan pasar yang mengarah ke wilayah Timur dan kawasan CIS.

Tulisan ini layak dijadikan referensi oleh peneliti untuk melihat penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Rusia. Atas dasar tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi penerapan kebijakan Rusia hingga saat ini yang arah aktivitasnya fokus terhadap penerapan diplomasi ekonomi. Adapun tulisan ini juga memperlihatkan kebijakan yang digunakan Rusia hingga saat ini merupakan sebuah respon atas sanksi ekonomi internasional terkait krisis di Ukraina yang mana, hal tersebut memperkuat penelitian atas pembahasan diplomasi ekonomi Rusia yang dalam kaitannya benar digunakan untuk menekan hambatan dagang.

Tulisan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan digarap oleh peneliti. Pada penelitian, peneliti menggunakan tulisan sebagai acuan kebijakan luar negeri Rusia yang membuktikan bahwa *great power diplomacy* merupakan kebijakan luar negeri Rusia untuk mengatasi sanksi ekonomi Barat. Adapun tulisan tidak menjelaskan mengenai strategi yang digunakan oleh Rusia untuk mencapai keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Sedangkan pada penelitian, akan berfokus terhadap analisis strategi keberhasilan *great power diplomacy* Rusia, yang mana akan dianalisis menggunakan kerangka konsep dari ahli yang mengemukakan perihal strategi *great power diplomacy*.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian, penggunaan konsep sangat diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang dapat berujung kepada hasil akhir dari penelitian

ini. Dalam rangka menganalisis permasalahan penelitian, digunakan konsep *great power diplomacy*.

1.7.1. *Great Power Diplomacy*

Great Power atau kekuatan besar dalam sistem internasional merupakan negara atau entitas politik yang memiliki pengaruh, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan pengaruh politik yang signifikan di tingkat global. Mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi peristiwa internasional, menentukan kebijakan global, dan memainkan peran utama dalam urusan dunia.²⁸ Adapun sejarah *great power* bermula sejak manusia mulai membentuk entitas politik yang lebih besar, seperti kerajaan, kekaisaran, atau negara-negara dengan pengaruh dominan.

Great power dalam mengategorikan status negara mulai dikenal pasca-Perang Dunia II. Pasca-Perang Dunia II, sistem internasional berada pada status unipolar, yang mana kekuatan besar hanya dipegang oleh satu negara. *Great power* Amerika Serikat menjadi *great power* dengan pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang mendominasi dunia. Negara ini memiliki kekuatan militer yang kuat, ekonomi yang besar, dan pengaruh yang luas dalam urusan global. Amerika Serikat juga memainkan peran penting dalam membentuk organisasi internasional seperti United Nations (UN) dan North Atlantic Treaty Organization (NATO).²⁹

Selama sejarah, *great power* terus berubah dan bergeser sesuai dengan perubahan politik, ekonomi, dan militer di dunia. Pasca-Perang Dingin, seiring dengan perubahan geopolitik, dunia beralih ke era kekuatan besar multipolar. Era ini ditandai dengan adanya beberapa *great power* yang saling bersaing dan

²⁸ Dylan Motin, "Great Power Politics in World History: Balance of Power and Central Wars Since Antiquity," *The Korean Journal of International Studies* 20, No. 2 (2022): 176-180.

²⁹ Dylan Motin, "Great Power Politics in World History: Balance of Power and Central Wars Since Antiquity," *The Korean Journal of International Studies*, 179.

mempengaruhi kebijakan dan dinamika global. Adapun saat ini, kekuatan besar sering diarahkan pada Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, Jepang, dan India, di antara kekuatan lainnya, memiliki pengaruh politik, ekonomi, dan militer yang signifikan.³⁰ Adapun untuk mencapai kepentingan nasionalnya dan meningkatkan kapabilitas sumber dayanya, para aktor negara *great power* akan membentuk aliansi atau sekutu melalui pendekatan dengan aktor negara lainnya.

Diplomasi merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional. Melalui diplomasi sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Diplomasi didefinisikan sebagai seni berkomunikasi dalam mencapai kepentingan tertentu.³¹

Dalam kajian diplomasi, terdapat klasifikasi diplomasi yang dilakukan berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dalam proses diplomasi itu sendiri, salah satunya ialah *great power diplomacy*. Secara umum *great power diplomacy* sendiri merujuk pada interaksi diplomatik dan politik antara negara-negara besar dalam sistem internasional. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan hubungan antara negara-negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan politik yang signifikan.

Pada abad ke-18 *great power diplomacy* merupakan usaha dari negara-negara besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa, tepatnya pada saat Eropa sedang mengalami masa transisi dari pemerintahan absolut ke pemerintahan

³⁰ Mark N. Katz, "Great Powers in the Twenty-First Century," *Journal of International Relations and Sustainable Development*, no. 10 (2018): 122.

³¹ Sofia Trisni, Putiviola Elian Nasir, dan Abdul Halim, *Diplomasi Sebuah Pengenalan Awal* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 12.

konstitusional.³² Konsep keseimbangan kekuasaan ini muncul sebagai reaksi terhadap Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) dan Perang Sembilan Tahun (1688-1697) yang mengakibatkan kerusakan yang parah di Eropa. Dalam konsep keseimbangan kekuasaan, negara-negara Eropa saling menjaga keseimbangan kekuatan agar tidak terjadi perang yang merusak kembali. Selama abad ke-18, Inggris dan Prancis merupakan kekuatan utama di Eropa, dengan Austria dan Rusia muncul sebagai kekuatan tambahan. Negara-negara ini sering kali terlibat dalam perang satu sama lain atau membentuk aliansi untuk menjaga kepentingan nasional mereka. Secara keseluruhan, *great power diplomacy* pada abad ke-18 merupakan usaha dari negara-negara besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa dan mempertahankan kepentingan nasional mereka melalui aliansi dan negosiasi.

Pada Perang Dunia I dan II merupakan titik balik penting dalam sejarah *great power diplomacy*, karena mengubah dinamika kekuasaan di dunia dan mempengaruhi cara negara-negara besar berinteraksi satu sama lain dalam hal diplomasi. Sebelum Perang Dunia I, *great power diplomacy* terutama didominasi oleh negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Namun, setelah Perang Dunia I, kekuatan Eropa menurun dan Amerika Serikat menjadi kekuatan besar baru di dunia, setelah Amerika Serikat dan Inggris.³³ Perang Dunia II kemudian menyebabkan kenaikan kekuatan Uni Soviet sebagai kekuatan besar ketiga di dunia.

Pada era Perang Dunia I, kehadiran *great power diplomacy* ditandai dengan upaya negara-negara besar untuk mempertahankan stabilitas dan perdamaian di

³² Jeremy Black, *Eighteenth-century Great power diplomacy and the balance of power* (New York: Palgrave Macmillan, 2000).

³³ Cornelia Navari, "Great Power Diplomacy," in *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp (London: SAGE Publications, 2016), 271.

Eropa melalui Liga Bangsa-Bangsa. Namun, Liga Bangsa-Bangsa gagal dalam upayanya untuk mencegah Perang Dunia II. Ketika terjadi Perang Dunia kedua, yang terlihat bagaimana negara-negara besar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengalahkan musuh yang sama. Sekutu yang terdiri dari Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat berhasil memenangkan perang melawan poros Jerman, Italia, Jepang. Periode pasca-Perang Dunia II, yang ditandai dengan munculnya Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Hubungan antara kedua blok ini penuh dengan ketegangan dan saling mencurigai, namun juga terdapat usaha untuk mencapai kerja sama melalui konferensi seperti Konferensi Yalta dan Konferensi Potsdam.³⁴

Periode Perang Dingin merupakan masa di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk memperoleh pengaruh dan memperkuat posisi mereka di tata dunia internasional. Pada masa ini terjadi pembentukan blok-blok politik seperti North Atlantic Treaty Organization (NATO) yang didominasi oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa, serta Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet dan sekutunya di Eropa Timur. Blok-blok politik ini merupakan contoh dari *great power diplomacy* pada masa Perang Dingin.³⁵

Pasca-Perang Dingin, dunia mengalami perubahan dalam tata dunia internasional dan memunculkan tantangan baru dalam menjalankan *great power diplomacy*. Peran negara-negara besar dalam politik internasional menjadi lebih kompleks dan multidimensional. Negara-negara berkekuatan besar tetap memiliki

³⁴ Cornelia Navari, "Great Power Diplomacy," in *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp, 272.

³⁵ Cornelia Navari, *Internationalism and the State in the Twentieth Century*, (London: Routledge, 2000), 156-269.

kepentingan nasional yang berbeda-beda, namun di sisi lain, mereka juga memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.³⁶ Oleh karena itu, terjadi kerja sama antara negara-negara besar menjadi semakin penting dalam menjalankan *great power diplomacy*. Pasca-Perang Dingin dunia mengalami pergeseran dalam hubungan antara negara-negara besar, terdapat upaya dari beberapa negara besar untuk mencari keseimbangan kekuatan yang lebih baik dan menghindari konflik langsung satu sama lain ataupun konflik dari kekuatan lain. Selain itu, negara-negara besar cenderung terus mengembangkan hubungan bilateral yang lebih erat, sambil tetap mempertahankan hubungan multilateral yang penting.

Dalam memahami konsep *great power diplomacy*, peneliti memberikan definisi *great power diplomacy* agar dapat memaknai dan mengetahui pendapat ahli mana yang tepat untuk menggambarkan pendekatan dan tujuan *great power diplomacy* dari Rusia. Menurut Norman Rich *great power diplomacy* adalah upaya negara-negara besar dalam mencapai tujuan-tujuan mereka melalui diplomasi dan kebijakan luar negeri yang cermat. Menurut Rich, *great power diplomacy* melibatkan berbagai strategi dan taktik yang digunakan oleh negara-negara besar untuk mempromosikan kepentingan mereka di tingkat internasional. Strategi-strategi ini mencakup diplomasi ekonomi, kerja sama militer, diplomasi nuklir, diplomasi multilateral, dan diplomasi, serta penggunaan kekuatan dan intimidasi ketika diperlukan. Secara keseluruhan, pandangan Norman Rich tentang *great power diplomacy* menekankan pentingnya diplomasi dalam mencapai tujuan-

³⁶ Cornelia Navari, "Great Power Diplomacy," in *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp, 272.

tujuan nasional di tingkat internasional. Akan tetapi, *great power diplomacy* Norman Rich berfokus pada sejarah hubungan internasional sejak zaman Yunani Kuno hingga Perang Dunia kedua. Rich mengidentifikasi sejumlah pola dalam hubungan antara negara-negara besar di masa lalu, dengan pendekatan bersifat historis dan deskriptif.³⁷

John Mearsheimer mengartikan *great power diplomacy* sebagai upaya para kekuatan besar untuk mempertahankan kekuasaan relatif mereka dalam sistem internasional yang anarkis, dan sering kali mencapai tujuan ini dengan menggunakan kekuatan militer.³⁸ Negara-negara besar cenderung membentuk koalisi untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dan menyeimbangkan kekuatan di dalam sistem internasional. Mearsheimer lebih menekankan pada penggunaan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan dan memengaruhi kebijakan luar negeri negara lain.

Jack S. Levy, membahas tentang *great power diplomacy* dari perspektif kausalitas perang, khususnya pada abad ke-17 sampai abad ke-20.³⁹ Menurut Levy, *great power diplomacy* merupakan upaya yang dilakukan oleh negara-negara besar untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka di tata dunia internasional. Levy menegaskan bahwa dalam konteks *great power diplomacy*, kekuatan militer dan kemampuan ekonomi menjadi faktor kunci yang menentukan kekuatan dan pengaruh sebuah negara. Levy juga mengemukakan bahwa *great power diplomacy* dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya perang antara negara-negara besar.

³⁷ J James J. Sheehan, *Review of Great Power Diplomacy Since 1914* by Norman Rich, *Central European History* 37, No. 3 (2004): 472-473.

³⁸ John J. Mearsheimer, *The tragedy of great power politics*, (New York: WW Norton & Company, 2001): 168-233.

³⁹ Jack S. Levy, *War in the modern great power system: 1495-1975* (Lexington Kentucky: University Press of Kentucky, 1983), 8-11.

Jika negara-negara besar dapat melakukan diplomasi dengan baik dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, maka kemungkinan terjadinya perang akan semakin kecil. Namun, jika terjadi ketegangan dan persaingan yang tinggi antara negara-negara besar, maka risiko perang akan semakin meningkat. Pada hakikatnya *great power diplomacy* yang dimaksud Levy adalah fokus pada peran *great power diplomacy* dalam mencegah terjadinya perang antara negara-negara besar.⁴⁰

Menurut Cornelia Navari, *great power diplomacy* adalah upaya negara-negara besar untuk memperoleh keuntungan strategis melalui penggunaan kemampuan ekonomi dan militer mereka, dengan tujuan mempengaruhi kebijakan luar negeri negara lain dengan mempromosikan kepentingan nasional mereka untuk bertahan dari tantangan global. Navari menekankan pentingnya koalisi antar kekuatan besar yang mampu membawa pencapaian tujuan bersama dan memperkuat posisi mereka dalam tata dunia internasional. Pada dasarnya Navari menekankan pentingnya kerja sama antara negara-negara besar dalam mengatasi masalah global, terutama era setelah berakhirnya Perang Dingin, untuk menunjukkan kepemimpinan dan memelihara perdamaian serta stabilitas internasional. Navari juga mengemukakan bahwasanya keberhasilan penerapan *great power diplomacy* dapat terlihat ketika sekutu bergantung dan yakin terhadap kemampuan dan posisi negara yang menerapkan diplomasi.⁴¹

Adapun definisi Navari mengenai *great power diplomacy* menjadi pengertian yang paling tepat untuk menggambarkan kasus penelitian. Rusia

⁴⁰ Jack S. Levy, "The causes of war revisited," *International Studies Quarterly* 48, No. 2 (2004): 171-193.

⁴¹ Cornelia Navari, "Great Power Diplomacy," in *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp (London:SAGE Publications, 2016), 268-269.

menggunakan *great power diplomacy* terhadap Tiongkok guna meningkatkan perdagangannya pascasanksi ekonomi Uni Eropa, yang artinya Rusia mempromosikan kepentingan nasional mereka untuk bertahan dari tantangan global (sanksi Uni Eropa sebagai aktor internasional). Dalam *The SAGE Handbook of Diplomacy* Cornelia Navari memberikan pemaparan bahwasanya terdapat strategi yang dapat dilalui negara kekuatan besar dalam mencapai keberhasilan *great power diplomacy* nya berikut diantara-Nya.⁴²

1. *Energy Diplomacy*

Menurut Cornelia Navari, energi merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan luar negeri melalui *great power diplomacy* bagi negara-negara besar. Hal ini disebabkan karena energi memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi, militer, dan politik. Selain itu, energi juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di tingkat regional maupun global. Negara-negara besar sering kali memperjuangkan kepentingan mereka di bidang energi dengan menggunakan berbagai macam instrumen diplomasi, termasuk kerja sama energi, persaingan, dan bahkan konflik. Negara-negara besar akan menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi negara-negara lain dalam hal produksi, distribusi, dan konsumsi energi.

Dalam pandangan Cornelia Navari, diplomasi energi dapat dilakukan oleh dua jenis negara, yaitu negara produsen dan negara konsumen energi. Bagi negara konsumen motivasi penerapan diplomasi energi adalah untuk mengamankan pasokan energi, yang berkaitan dengan

⁴² Cornelia Navari, "Great Power Diplomacy," in *The SAGE Handbook of Diplomacy*, ed. Costas M. Constantinou, Pauline Kerr, dan Paul Sharp, 267-279.

pencarian pasar impor untuk negara konsumen. Bentuk diplomasi energi negara konsumen dapat diterapkan melalui instrumen pendanaan, yang mana negara konsumen dapat memberikan bantuan pendanaan terkait kerja sama pembangunan di sektor energi. Adapun pendanaan tersebut dapat melalui pinjaman prefensial, pinjaman yang diubah menjadi hibah ataupun keringanan utang, serta dukungan politik terhadap negara produsen.⁴³ Sedangkan untuk negara produsen, diplomasi energi dikerahkan untuk mengamankan cadangan dan mengintervensi pasar internasional atau pasar konsumen energi. Adapun negara produsen dapat menerapkan diplomasi energi melalui hubungan prefensial antar negara dengan subsidi harga dan diplomasi pengiriman energi, yang mana berkaitan dengan infrastruktur ekspor terbatas di kawasan tersebut untuk mendorong akses istimewa.⁴⁴

2. *Currency Diplomacy*

Menurut Cornelia Navari, *currency diplomacy* atau diplomasi mata uang adalah salah satu bentuk diplomasi ekonomi dalam *great power diplomacy* yang cukup penting. Diplomasi mata uang ini terkait dengan upaya negara-negara besar untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik mereka. Negara dalam hal ini dapat menggunakan diplomasi mata uang dalam mempengaruhi kebijakan moneter negara lain atau untuk mempengaruhi posisi mereka dalam hubungan ekonomi internasional. Selain itu, diplomasi mata uang juga dapat digunakan sebagai alat dalam

⁴³ Andreas Goldthau, "Energy Diplomacy in Trade and Investment of Oil and Gas," in *International Political Economy of Energy and Natural Resources*, ed. Andreas Goldthau, dan Jan Martin Witte (Washington: Brooking Press, 2010), 35.

⁴⁴ Andreas Goldthau, "Energy Diplomacy in Trade and Investment of Oil and Gas," in *International Political Economy of Energy and Natural Resources*, ed. Andreas Goldthau, dan Jan Martin Witte, 36.

mencapai tujuan keamanan nasional. Sebagai contoh, negara-negara besar dapat menggunakannya untuk memberikan dukungan keuangan kepada sekutu mereka.

Navari menyinggung bahwasanya diplomasi mata uang dalam *great power diplomacy* dapat dilakukan melalui pengaturan kebijakan nilai tukar untuk mempengaruhi posisi tawar negara-negara dalam perdagangan internasional. Misalnya, negara dapat melakukan intervensi dengan metode unilateral yang mana keputusan penetapan diplomasi mata uang langsung ditetapkan oleh pemerintah dan diplomat negara tersebut memberikan penawaran kepada pemerintah lain. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan mata uang nasional sebagai alat untuk memberikan pinjaman terhadap negara lainnya, yang dalam pengaplikasiannya dapat memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman, seperti mempromosikan penggunaan mata uangnya, meningkatkan daya tarik ekonomi dan keuangan negara pemberi pinjaman, serta memberikan pengaruh dan kontrol lebih besar terhadap kebijakan ekonomi negara peminjam. Selain itu terhadap juga metode secara bilateral atau multilateral, yang mana pemerintah menegosiasikan penetapan kebijakan perdagangan internasional dengan pemerintah negara lainnya.⁴⁵

3. *Economic Aid Diplomacy*

Menurut Cornelia Navari, *economic aid diplomacy* atau diplomasi bantuan ekonomi merujuk kepada bentuk upaya bantuan ekonomi untuk meyakinkan sekutu dalam *great power diplomacy* yang dapat dilakukan

⁴⁵ Brendan Brown, *Currency Diplomacy*, (London: Palgrave Macmillan, 2006), 146.

melalui beberapa cara. Pertama adalah pemberian pinjaman, di mana negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar dapat memberikan pinjaman untuk membantu pembangunan ekonomi negara penerima. Kedua adalah pemberian Investasi langsung, negara-negara besar dapat menginvestasikan modalnya langsung ke negara penerima untuk membantu pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Investasi ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kondisi ekonomi di negara penerima. Terkait dengan investasi *great power diplomacy*, ditujukan untuk dapat mengeksploitasi komoditas tertentu.

Namun, Navari menekankan bahwa bantuan ekonomi dalam menjalankan *great power diplomacy* harus digunakan dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi atau memperkuat ketergantungan ekonomi negara sekutu pada negara yang memberikan preferensi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan regional dalam jangka panjang.

4. *Military Diplomacy*

Cornelia Navari menjelaskan bahwa *military diplomacy* atau diplomasi militer merupakan upaya untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu melalui penggunaan kekuatan militer, yang mana dalam konteks damai tidak melakukan kekerasan dalam kekuatan militer tersebut. Diplomasi militer dapat digunakan untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan pihak lain melalui ancaman atau penggunaan kekuatan militer. Dalam konteks *great power diplomacy* Navari, diplomasi militer dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan sekutu dengan langkah

damai. Secara keseluruhan, Navari menganggap diplomasi militer sebagai salah satu alat yang dapat digunakan dalam *great power diplomacy*, namun harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang dengan strategi diplomasi lainnya.

Dalam konteks *great power diplomacy*, kerja sama militer antara negara-negara besar dapat menjadi salah satu bentuk meyakinkan sekutu. Dalam kerja sama militer, negara-negara besar dapat memberikan bantuan militer, dengan membentuk aliansi militer, mengadakan latihan militer bersama, berbagi teknologi militer, ataupun memberikan penyediaan akan senjata melalui kegiatan perdagangan senjata kepada negara-negara yang dianggap sekutu dan bersahabat, sebagai bentuk dukungan dan perlindungan terhadap keamanan mereka. Adapun dukungan militer dapat didorong dengan kesepakatan kontrak antarnegara.⁴⁶

5. *Multilateral Diplomacy*

Multilateral diplomacy atau diplomasi multilateral menurut Cornelia Navari adalah sebuah bentuk diplomasi yang melibatkan beberapa negara atau aktor internasional dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan utama dari *multilateral diplomacy* adalah untuk menciptakan kesepakatan yang lebih stabil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam konteks *great power diplomacy*, *multilateral diplomacy* seringkali digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi sebuah negara di panggung dunia dengan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam mencapai tujuan bersama. Navari juga menggunakan pendekatan multilateral dalam hubungan bilateral dalam

⁴⁶ Erik Pajtinka, "Military Diplomacy and Its Present Functions," *International & National Studies*, No. 20 (2016): 188.

great power diplomacy yang digunakan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara dua negara atau lebih melalui partisipasi dalam organisasi multilateral yang memiliki tujuan serupa.⁴⁷

Dalam konteks hubungan internasional, pendekatan multilateral dapat membantu negara-negara dalam meningkatkan kekuatan *bargaining* dan pengaruh mereka dalam membentuk kebijakan internasional. Dalam hubungan bilateral, pendekatan multilateral dapat bermanfaat dalam beberapa cara. Pertama, melalui partisipasi dalam organisasi multilateral yang berfokus pada isu-isu yang relevan, negara-negara dapat memperoleh dukungan dari negara-negara lain dengan kepentingan serupa. Kedua, organisasi multilateral dapat memberikan platform bagi negara-negara untuk saling berinteraksi, menjalin kerja sama dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ketiga, organisasi multilateral juga dapat membantu negara-negara untuk mengatasi perbedaan yang mungkin timbul dalam hubungan bilateral mereka melalui forum diskusi yang terstruktur dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, pendekatan multilateral dalam hubungan bilateral juga memiliki keterbatasan. Beberapa negara mungkin merasa bahwa organisasi multilateral tidak cukup efektif dalam mengatasi masalah yang kompleks dan memilih untuk mengejar solusi bilateral. Selain itu, keikutsertaan dalam organisasi multilateral juga dapat menghadirkan tantangan seperti peningkatan biaya dan risiko terhadap negara.

⁴⁷ Cornelia Navari, *International Relations and Diplomacy*, In *The International Studies Encyclopedia*, diedit oleh R. A. Denmark (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004): 1145-1158.

Melalui konsep *great power diplomacy*, peneliti akan menggunakan strategi-strategi yang dimaksudkan oleh Cornelia Navari tersebut dalam menjelaskan bagaimana strategi *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa. Berangkat dari analisis strategi *great power diplomacy* Rusia, peneliti kemudian akan menyimpulkan strategi mana yang menjadi faktor utama, faktor pendukung, dan faktor pendorong dari keberhasilan *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok. *Great power diplomacy* dianggap menjadi konsep yang tepat dalam penelitian ini dikarenakan, *great power diplomacy* diterapkan sebagai kebijakan luar negeri Rusia untuk mengatasi krisis setelah invasi Rusia ke Ukraina, terutama dalam hal perekonomian, di mana Rusia melakukan peralihan pasar dari Uni Eropa ke Tiongkok.

Pemahaman Cornelia Navari mengenai *great power diplomacy* menjadi pilihan yang tepat untuk menganalisis strategi Rusia sebab, Navari memfokuskan penerapan *great power diplomacy* pasca-Perang Dingin. Selain itu, Navari juga menyatakan bahwasanya *great power diplomacy* digunakan suatu negara besar untuk mempengaruhi negara besar lainnya guna membentuk koalisi yang mampu mengatasi tantangan global baik secara militer maupun ekonomi. Hal ini tentunya berkaitan dengan Rusia yang berusaha meyakinkan Tiongkok untuk bekerja sama dalam rangka mengatasi ancaman dari Barat khususnya Uni Eropa. Adapun Rusia dalam hal ini berusaha untuk membawa kepercayaan Tiongkok tersebut melalui keuntungan bersama, yang artinya Rusia juga memberikan tawaran *win-win solution* terhadap Tiongkok, baik melalui kemampuan ekonomi, militer, ataupun politiknya. Sehingga untuk menjawab pertanyaan penelitian akan menjadi relevan

dalam menggunakan konsep *great power diplomacy* yang dikemukakan oleh Cornelia Navari.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan sejumlah cara yang diterapkan penelitian dalam mencapai tujuan penelitian yang berujung kepada perolehan suatu pengetahuan. Sedangkan metodologi dimaksudkan sebagai sejumlah prosedur yang dilakukan untuk memperoleh jawaban dari bagaimana suatu peristiwa hubungan internasional dapat terjadi.⁴⁸ Untuk menjelaskan penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menjawab permasalahan secara mendalam, dijelaskan dalam konteks situasi dan waktu yang bersangkutan, objektif, dan data diperoleh bukan dengan cara kuantitatif.⁴⁹ Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis, yang mana kajian fenomena akan diangkat secara lebih rinci.⁵⁰ Tujuan peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif analisis adalah untuk memperoleh penjelasan yang objektif mengenai *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangan pascapemberlakuan sanksi ekonomi dari Uni Eropa.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan sebagai acuan peneliti dalam memfokuskan permasalahan penelitian, sehingga kajian penelitian akan memiliki posisi pasti

⁴⁸ Mohtar Mas'oad, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 3.

⁴⁹ Muhammad Arsyam, dan M. Yusuf Tahir. "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif," *Journal of Education and Islamic Studies* 3, no. 1 (Juni 2022): 2.

⁵⁰ Merriam, dan Gumelar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Sosial Humaniora* 9, no. 2(2005): 57-65.

sesuai dengan batasan penelitian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan penelitian pada tahun 2016-2022. Rentang waktu tersebut digunakan sebab, sejak November 2016 Rusia telah menerapkan *great power diplomacy* terhadap Tiongkok. Tahun 2022 digunakan sebagai batasan akhir penelitian dikarenakan, pada tahun tersebut masih terjadi peningkatan terhadap perdagangan Rusia didukung oleh pemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa yang masih berlanjut.

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis Data

Dalam penelitian terdapat dua fokus unit terikat yaitu, unit analisis (variabel dependen) yang merupakan fokus utama suatu penelitian, dimaksudkan sebagai objek yang hendak dijelaskan, diramalkan, ataupun diteliti perilakunya.⁵¹ Pada penelitian ini unit analisisnya adalah *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangan. Unit lainnya dalam sebuah penelitian disebut sebagai unit eksplanasi (variabel independen) merupakan unit yang memberikan dampak atau pengaruh terhadap perilaku unit analisis. Pada penelitian ini, unit eksplanasi ditujukan kepada sanksi ekonomi Uni Eropa.

Menurut Joshua S. Goldstein dan Jon C. Pevehouse terdapat empat tingkat analisis dalam hubungan internasional yaitu, tingkat global, tingkat antarnegara, tingkat domestik dan tingkat individu.⁵² Pada penelitian ini akan dianalisis penerapan *great power diplomacy* oleh Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya. Berangkat dari hal tersebut, tingkat analisis penelitian berada pada tingkat antarnegara. Hal ini dikarenakan, Goldstein dan

⁵¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta:LP3ES, 1990),35.

⁵² Joshua Goldstein, dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*, (Longman 10th editon, 2013), 18.

Pevehouse menyatakan bahwa diplomasi merupakan tingkat analisis antarnegara bagian.⁵³

Terdapat tiga model dalam mengidentifikasi tingkat analisis yaitu reduksionis, induksionis, dan korelasionis.⁵⁴ Reduksionisme merupakan model tingkat analisis yang menggambarkan kondisi unit eksplanasi lebih rendah dari unit analisisnya. Induksionis di sisi lain, menggambarkan kondisi unit eksplanasi lebih tinggi dibandingkan untuk analisisnya. Terakhir, korelasionis merupakan kondisi unit eksplanasi dan unit analisis yang berada pada posisi setara. Berdasarkan model tersebut maka, model yang dapat mengidentifikasi tingkat analisis penelitian ini adalah induksionis. Hal ini disebabkan oleh unit analisis penelitian berada pada level antarnegara yang mana lebih rendah dibandingkan unit eksplanasinya yakni, sanksi ekonomi Uni Eropa, yang menurut Goldstein berada level global.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau literatur yang disebut sebagai jenis penelitian *library research*. Data kepustakaan atau data literatur merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan dan sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, surat kabar, situs resmi pemerintah, situs resmi organisasi, laporan resmi, hingga portal berita yang secara akademis dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁵ Adapun sumber-sumber informasi yang diperoleh peneliti berasal dari buku dengan judul Ilmu Hubungan Internasional:, *Basic of Qualitative Research, Research Design:*

⁵³ Joshua Goldstein, dan Jon C. Pevehouse, *International Relations*.

⁵⁴ Rusdiyanta, Tulis Yuniasih, dan Anggun Puspitasari, *Teori Hubungan Internasional* (Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur, 2020), 69-70.

⁵⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 72.

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods, Diplomasi Sebuah Pengenalan Awal, Dinamika Politik Global Kontemporer, Pengantar Metodologi Penelitian, Disiplin dan Metodologi, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations, Diplomacy Economic Concepts, dan Trade Diplomacy Transformed, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.

Jurnal ilmiah internasional maupun nasional dikumpulkan untuk menjadi referensi bagi penelitian didapat dari *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Islamic Finance & Business Review, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Insignia Journal of International Relations, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Journal Communitarian, Padjadjaran, Journal of International Relations, The Pacific Review, The Hauge Journal of Diplomacy, Makara Sosial Humaniora, Journal of Education and Islamic Studies, Jurnal Sosial Politik, Journal of International Studies, Wirtschaftsdienst, Chin. J. Slavic Stu, American Journal of Trade and Policy, Review of International Studies, The Hauge Journal of Diplomacy, The International Studies Encyclopedia, Transactions of the Institute of British Geographer, Jurnal UMJ, dan Jurnal Global & Strategis.*

Sumber informasi juga dikumpulkan dari laporan pemerintah seperti laporan *Prepared for Members and Committees of Congress, Russia's 2022 Invasion of Ukraine: Overview of U.S. Sanctions and Other Responses, Sanctions against Russia, dan The Impact of Sanctions and Export Controls on the Russian Federation Fact Sheet.*

Situs-situs resmi juga digunakan untuk memberi informasi faktual bagi penelitian. Situs pemerintah dan organisasi pemerintah dari *European Council* (<https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/>), *The Russian*

Government (<http://government.ru/en/>), dan *The Central Bank of Russia* (<https://www.cbr.ru/eng/>), Situs lembaga penelitian dari *Macrotrends* (<https://www.macrotrends.net/>), *Diplomacy* (<https://www.diplomacy.edu/>), dan *The Observatory of Economic Complexity* (<https://oec.world/>). Situs berita resmi dari *BBC News* (<https://www.bbc.com/>), *Russia Briefing* (<https://www.russia-briefing.com/>) dan *The Diplomat* (<https://thediplomat.com/>).

1.8.5. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab penelitian, peneliti akan melakukan teknik analisis data yang menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman terdiri dari tiga tahapan.⁵⁶ Tahap pertama adalah dengan mereduksi data. Dimaksudkan sebagai sebuah proses untuk memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data dari tulisan yang dijadikan sebagai sumber referensi. Dalam penelitian ini, akan direduksi data berdasarkan fokus penelitian terkait diplomasi ekonomi Rusia dalam meningkatkan perdagangan pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa.

Tahap kedua adalah dengan melakukan penyajian data. Adapun penyajian data dimaksud sebagai proses untuk meringkas dan mengorganisir kumpulan informasi yang telah diperoleh peneliti, yang secara umum disajikan dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini, kumpulan data yang diperoleh dari tahap reduksi kemudian akan dielaborasi dengan konsep yang digunakan peneliti yaitu, konsep *great power diplomacy*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep keberhasilan *great power diplomacy* oleh Cornelia Navari yang terdiri dari lima strategi yaitu, *energy*

⁵⁶ Matthew B. Miles dan A. Micheal Hubberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (United States of America: SAGE Publications, 1994), 11.

diplomacy, currency diplomacy, economic aid diplomacy, military diplomacy, dan multilateral diplomacy. Energy diplomacy pada penelitian adalah kerja sama energi Rusia terhadap Tiongkok, di mana Rusia berperan sebagai pengekspor dan Tiongkok sebagai pihak pengimpor. *Currency diplomacy* pada penelitian ini adalah dengan melihat kebijakan mata uang nasional yang dilakukan Rusia dalam perdagangan bilateralnya dengan Tiongkok. *Economic aid diplomacy* pada penelitian ini adalah untuk melihat apakah Rusia memberikan bantuan ekonomi berupa pendanaan terhadap Tiongkok yang mampu meningkatkan kegiatan perdagangan atau ekspor Rusia ke Tiongkok. *Military diplomacy* pada penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan kerja sama militer Rusia bersama Tiongkok, yang mana peneliti akan melihat implikasi dari kerja sama militer tersebut mampu yang meningkatkan iklim bisnis yang positif dan mendorong pertumbuhan perdagangan Rusia dengan Tiongkok. *Multilateral diplomacy* pada penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana Rusia melakukan pendekatan multilateral untuk mencapai kepentingan interaksi perdagangan bilateralnya dengan Tiongkok.

Tahap ketiga dari teknik analisis data adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Peneliti dalam hal ini akan menarik kesimpulan secara garis besar lewat hasil analisis yang telah dielaborasi dalam penelitian. Dalam hal ini, ditarik kesimpulan mengenai analisis penerapan *great power diplomacy* Rusia terhadap Tiongkok dalam meningkatkan perdagangannya pascapemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II RELASI DAGANG RUSIA-TIONGKOK TERHADAP PENINGKATAN PERDAGANGAN RUSIA PASCASANKSI EKONOMI UNI EROPA

Secara garis besar peneliti akan membahas secara umum mengenai hubungan perdagangan Rusia dengan Uni Eropa maupun dengan Tiongkok. Pada sub bab hubungan perdagangan Rusia dan Uni Eropa, peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci sejarah hubungannya, pemberlakuan sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, hingga dampak dari sanksi tersebut terhadap hubungan perdagangan Rusia dengan Uni Eropa. Kemudian pada sub bab hubungan perdagangan Rusia dengan Tiongkok, peneliti akan memberikan penjelasan secara rinci sejarah hubungannya serta tantangan hingga peningkatan perdagangan Rusia dengan Tiongkok akibat pemberlakuan sanksi ekonomi Uni Eropa. Sub bab selanjutnya kemudian memberikan pemaparan terkait peningkatan yang berangkat dari hubungan dagang Rusia dengan Tiongkok pascapemberlakuan sanksi.

BAB III KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan secara rinci penetapan kebijakan luar negeri Rusia dari masa ke masa, yang mengarah kepada penetapan diplomasinya. Hal ini dibutuhkan untuk melihat langkah dan jenis diplomasi yang diterapkan

Rusia dalam berinteraksi dengan aktor negara lainnya ataupun dalam menerapkan strategi untuk melindungi kepentingan domestiknya. Pada bab ini akan dijelaskan diplomasi dalam kebijakan luar negeri Rusia era Boris Yeltsin (1991-1999), Vladimir Putin (2001-2008), Dmitry Medvedev(2009-2013), dan Vladimir Putin (2013-2023).

BAB IV GREAT POWER DIPLOMACY RUSIA TERHADAP TIONGKOK DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN PASCAPEMBERLAKUAN SANKSI EKONOMI UNI EROPA

Pada bab ini peneliti akan menggunakan konsep *great power diplomacy* yang dikemukakan oleh Cornelia Navari dalam menjelaskan analisis dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, keberhasilan pengaplikasian strategi *great power diplomacy* yang digunakan oleh Rusia terhadap Tiongkok pada tahun 2016-2022 untuk meningkatkan perdagangannya pascasanksi ekonomi yang telah dijatuhkan oleh Uni Eropa.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang memiliki cakupan akan pengetahuan penting dari penelitian ini. Bab ini memberikan garis besar terhadap kontribusi apa yang diberikan untuk lingkungan akademis dan pemangku kepentingan.